

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tenagakerja memainkan peran penting untuk pembangunan sebuah negara. Indonesia dengan populasi yang besar dan sumberdaya manusia yang beragam, tenaga kerja tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi, tetapi juga menggambarkan dinamika sosial, perkembangan teknologi dan kebijakan yang sedang berkembang ¹.

Seiring dengan populasi penduduk yang terus bertambah hal ini juga meningkatkan jumlah angkatan kerja dan aktivitas kerja yang beragam. Aktivitas kerja yang sangat beragam saat ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan, penyakit, bahkan kematian. Jumlah kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia pun meningkat setiap tahunnya diketahui sebanyak 234.370 kasus pada tahun 2021, 297.725 kasus pada tahun 2022, dan 370.747 kasus pada tahun 2023 ².

Melihat hal ini, upaya untuk memberikan perlindungan sosial sangatlah penting untuk memastikan hak-hak dasar manusia terpenuhi. Undang-Undang No. 11 thn 2009 tentang Kesejahteraan sosial mencakup upaya-upaya untuk mencegah terjadinya krisis sosial, meminimalkan dampak negatif dari peristiwa yang mengganggu keseimbangan sosial, serta membangun sistem pendukung yang kuat bagi masyarakat yang rentan ³.

Dalam upaya memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia membuat keputusan yang tertuang dalam TAP Nomor X/MPR/2001. MPR menugaskan Presiden untuk mengambil langkah konkret dalam merancang dan melaksanakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dirancang dengan tujuan memberikan perlindungan sosial yang komprehensif dan terintegrasi kepada seluruh rakyat Indonesia ⁴.

Sebagai bentuk implementasi amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah merancang sistem perlindungan sosial yang komprehensif diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). SJSN merupakan kerangka

kerja yang mengatur penyelenggaraan berbagai program jaminan sosial oleh lembaga-lembaga terkait.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ini disahkan oleh Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 dimana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ini merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial. BPJS ini terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan, hadir sejak 1 Januari 2014, menjadi garda terdepan dalam melindungi kesehatan masyarakat. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digagasnya membuka akses layanan kesehatan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali.

Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan, yang dulunya PT Jamsostek, bertransformasi pada 1 Januari 2014 berfokus pada program jaminan sosial seperti Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun. Hal ini menjadi salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Program ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak individu dan menciptakan kesejahteraan di seluruh lapisan Masyarakat. Baik tenaga kerja dari sektor formal maupun informal, serta mereka yang memiliki penghasilan tinggi maupun rendah, semua berhak mendapatkan manfaat dari program jaminan sosial ini ³.

Di Indonesia cakupan jaminan sosial pada tenaga kerja masih rendah. Pada 2023 angkatan kerja Indonesia mencapai 147,71 juta orang dan hanya 40,10 juta orang yang tercatat menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan ⁵. Di tahun 2024 ini, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan jumlah peserta aktif bertambah 12,40 juta atau menjadi 53,86 juta peserta aktif

Pada Provinsi Jambi diketahui angkatan tenaga kerja mencapai 1.887.840 orang dan jumlah peserta yang aktif hanya 682.921 (36,17%) sedangkan jumlah kecelakaan kerja pun terus meningkat pada provinsi ini. Menurut laporan BPJS Ketenagakerjaan Jambi jumlah kasus kecelakaan kerja naik sebesar 20,64% yang mana 1.119 kasus pada tahun 2022 naik menjadi 1.350 kasus pada tahun 2023. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jambi mengatakan pada tahun 2024 target kepesertaan yang ingin dicapai sebesar 53%. Pertumbuhan

penduduk di Provinsi Jambi mempengaruhi capaian kepesertaan BPJS Tenagakerja beberapa factor seperti tingkat kelahiran yang tinggi, migrasi masuk, dan penurunan angka kematian. Pertumbuhan penduduk ini membawa sejumlah tantangan dan peluang, terutama terkait dengan dinamika urbanisasi dan peningkatan angkatan kerja terutama di Kota Jambi

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk dan Angkatan kerja Kab/Kota Provinsi Jambi 2021-2023

Wilayah	Jumlah Penduduk			Angkatan Kerja		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Kerinci	251,9	253,9	255,1	134,07	139,9	140,7
Merangin	355,7	357,6	368,4	201,8	203,2	194,8
Sorolangun	293,6	298,1	302,2	145,2	151,8	143,9
Batanghari	306,7	313,2	312,7	138,5	129,3	144,1
Muaro Jambi	406,8	412,8	418,8	214,8	235,03	233,1
Tanjung Jabung Barat	231,8	234,2	236,7	117,3	120,684	119,8
Tanjung Jabung Timur	320,6	324,5	330,5	184,2	177,2	171,4
Tebo	340,9	344,8	350,8	186,8	185,7	180,2
Bungo	367,2	373,3	376,4	178,8	194,3	196,2
Kota Jambi	612,2	619,6	627,8	294,3	303,5	311,04
Kota Sungai Penuh	97,8	99,2	99,8	44,8	43,3	52,1

Sumber : bps.go.id

Kota Jambi, sebagai wilayah dengan penduduk dan angkatan kerja terbanyak di Provinsi Jambi, menarik banyak pendatang dari daerah sekitarnya karena peluang ekonomi yang lebih baik. Pertumbuhan penduduk didorong oleh populasi usia produktif yang besar, tingkat fertilitas tinggi, serta investasi besar dalam infrastruktur dan fasilitas publik. Perkembangan ekonomi yang pesat menciptakan banyak lapangan kerja baru, menarik pekerja dari berbagai daerah dan mendorong peningkatan partisipasi angkatan kerja ⁶.

Tabel 1. 2 Presentase Angkatan Kerja dengan Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kota Jambi 2021-2023

Tahun	Angkatan Kerja	Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Presentase
2021	294 349,00	127,391	43,2%
2022	303 517,00	171,766	56,6%
2023	311 048,00	158,254	50,8%

Sumber : bps.go.id dan data primer BPJS Ketenagakerjaan Kota Jambi

Diketahui bahwa presentase peserta ketenagakerjaan Kota Jambi sudah mencapai 50,8% dari jumlah Angkatan kerja, namun sayangnya terjadi penurunan jumlah peserta pada tahun 2023 . Dengan meningkatnya kasus kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian, seharusnya cakupan peserta juga dapat meningkat. Penurunan jumlah peserta dapat disebabkan karena banyak perusahaan atau perseorangan yang mungkin mengalami kesulitan finansial, yang yang berpotensi mengakibatkan pengurangan tenaga kerja serta penghentian pembayaran BPJS Ketenagakerjaan ⁷. Selain itu, kualitas pelayanan, seperti efektivitas komunikasi dan kemudahan akses terhadap layanan, turut mempengaruhi tingkat kepuasan peserta, yang pada gilirannya dapat berdampak pada tingkat partisipasi mereka dalam program ini ⁸.

Tabel 1. 3 Jumlah Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Jambi 2023 Menurut Kategorinya

Penerima Upah	Jasa Konstruksi	Bukan Penerima Upah	PMI
74,800	56,107	27,347	0

Sumber :Data Primer BPJS Ketenagakerjaan Jambi

Dari table diatas peserta Penerima upah adalah mereka yang bekerja di bawah naungan perusahaan atau organisasi yang terdaftar secara resmi dan memiliki hubungan kerja yang diatur oleh kontrak formal ⁹. Jasa konstruksi adalah layanan yang mencakup berbagai aspek dalam industri konstruksi, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek. Ini melibatkan penyediaan keahlian dan sumber daya untuk merancang, membangun, dan memastikan kualitas pekerjaan konstruksi. Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah individu yang meninggalkan tanah air untuk bekerja di luar negeri dalam

berbagai sektor seperti pertanian, konstruksi, perhotelan, dan pekerjaan rumah tangga ¹⁰.

Sedangkan kategori peserta Bukan Penerima Upah yaitu pekerja yang bekerja secara mandiri dan juga sektor informal yang tidak terikat dengan peraturan dan perlindungan ketenagakerjaan yang ketat. Contoh peserta kategori ini adalah : pemilik usaha, pedagang, petani, ojek, dll. Berdasarkan table diatas, Pekerja Bukan Penerima Upah merupakan kategori kepesertaan terendah setelah kategori pekerja migran. Berbagai tantangan dalam implementasi program ini masih harus diperhatikan, pekerja pada kategori ini sering kali tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan atau fasilitas keselamatan kerja yang layak. Mereka sangat rentan terhadap kecelakaan di tempat kerja yang bisa berujung pada cedera serius atau kematian ¹¹.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan peneliti beberapa peserta belum sepenuhnya memahami prosedur yang ada dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa peserta sering lupa dengan tahapan prosedur yang ada sehingga harus kembali lagi ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Namun, karena antrean yang panjang, beberapa dari mereka memilih untuk tidak melanjutkan proses. Beberapa peserta juga beranggapan bahwa proses klaim, baik untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), maupun Jaminan Hari Tua (JHT), dianggap memakan waktu. Banyak juga Masyarakat Bukan Penerima Upah yang belum menjadi peserta akibat ketidaktahuan mereka tentang program ini ⁹.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nof Miranda dan Dr. Mahyuazar (2019), strategi komunikasi yang efektif memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini menekankan bahwa komunikasi yang jelas, konsisten, dan tepat sasaran dapat mendorong partisipasi lebih luas dari Masyarakat ¹². Pada penelitian Omega Puspita (2022), mengungkapkan faktor penghambat komunikasi dalam mengimplementasikan program dikarenakan adanya informasi yang tidak benar tentang iuran, manfaat serta peraturan program. Selain itu, kuantitas tenaga kerja juga tidak sebanding dengan jumlah calon/peserta yang akan diberikan sosialisasi. Tetapi anggaran

yang memadai, sarana dan fasilitas yang lengkap, termasuk peralatan kantor dan infrastruktur IT serta struktur organisasi yang jelas dan SOP yang mudah dipahami mempermudah pegawai dalam menjalankan tugas dan komunikasi, baik secara internal maupun eksternal, sehingga memperkuat kepercayaan dan kepuasan peserta terhadap program ini ¹³.

Hasil penelitian Ferdy Syahputra (2023) pun mengungkapkan dalam pengimplementasian programnya BPJS Tenagakerja kota Medan belum melakukan penyampaian informasi yang merata serta fasilitas sarana dan prasana juga masih kurang dirasakan oleh peserta yang menyebabkan antrian panjang sehingga masyarakat kurang puas terhadap pelayanan tersebut tetapi indikator disposisi dan struktur birokrasi yang sudah baik membantu jalan para petugas pelaksana untuk memberikan pelayanan ¹⁴.

Dalam penelitian Monica Oktriani Gurusinga (2023) pada pengemudi ojek online di Pekanbaru pun mengungkapkan komunikasi yang dilakukan belum tepat sasaran. Kualitas Sumberdaya manusia yang kurang ramah, kurangnya jumlah pegawai pada saat pelayanan serta stuktur birokrasi yang panjang secara daring masih harus diperbaiki dalam pengimplementasian program jaminan sosial ini ¹⁵. Menurut Bignesh Dash Mohapatra faktor umum, yaitu ekonomi, politik, operasional, dan sosial-psikologis, yang secara signifikan memengaruhi kontribusi pekerja tidak terorganisir terhadap asuransi sosial ¹⁶.

BPJS Ketenagakerjaan Kota Jambi, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerahnya, memiliki tugas penting untuk memastikan bahwa seluruh tenaga kerja, termasuk tenaga kerja bukan penerima upah (BPU), mendapatkan akses yang merata dan pelayanan yang optimal terhadap program ini. Mengingat pentingnya jaminan sosial bagi perlindungan tenaga kerja, tantangan seperti penyampaian informasi, keterbatasan fasilitas, sikap pelaksana dan prosedur yang belum sepenuhnya efisien masih menjadi kendala dalam implementasinya.

Selain itu, dari sisi kesehatan, tenaga kerja sektor informal seperti BPU sangat rentan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kondisi kesehatan yang memburuk akibat minimnya perlindungan sosial. Kurangnya jaminan kesehatan

dan keselamatan kerja pada BPU dapat meningkatkan angka morbiditas dan kecacatan akibat kecelakaan kerja, serta berdampak langsung pada kesehatan mental mereka akibat tekanan ekonomi pascakecelakaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja BPU di Kota Jambi, guna memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas serta kualitas pelayanan bagi peserta program tersebut, terutama dalam mendukung kesejahteraan kesehatan tenaga kerja BPU.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah. Bagaimana Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah di BPJS Ketenagakerjaan Kota Jambi 2024 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis “Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja Bukan Penerima Upah (BPU) di BPJS Ketenagakerjaan Kota Jambi”.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui efektivitas komunikasi dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja BPU di BPJS Ketenagakerjaan Kota Jambi
2. Untuk mengetahui ketersediaan sumber daya, baik berupa tenaga kerja, fasilitas, maupun infrastruktur yang mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja BPU di Kota Jambi.
3. Untuk mengetahui disposisi atau sikap petugas BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan kepada peserta BPU.
4. Untuk mengetahui kesesuaian dan kelengkapan struktur birokrasi yang meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mekanisme kerja dalam

implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja BPU.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan Ilmu Kesehatan Masyarakat, khususnya dalam bidang Administrasi Kebijakan Kesehatan. Terdapat beberapa kajian dalam bidang ini, yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Kesehatan dan pemahaman masyarakat terhadap program jaminan kesehatan. tentang Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Bukan Penerima Upah di BPJS Ketenagakerjaan Kota Jambi Serta dapat dijadikan sebagai referensi yang relevan untuk penelitian selanjutnya terkait implementasi dan pemahaman program jaminan kesehatan di berbagai konteks dan lokasi lainnya.

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan BPJS Ketenagakerjaan Kota Jambi, terutama bagi pekerja bukan penerima upah serta menjadi bahan pertimbangan yang sangat berharga bagi BPJS Ketenagakerjaan Kota Jambi dalam pengambilan keputusan strategis.
2. Bagi Masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terlebih tenaga kerja Bukan Penerima Upah tentang pentingnya perlindungan sosial melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan supaya mereka dapat mengambil keputusan yang lebih tepat terkait partisipasi dalam program ini.